

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semua Negara di dunia pasti berupaya untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus melestarikan bumi yang kita tempati. Agar upaya ini terarah pada tahun 2000 negara-negara di seluruh dunia yang merupakan anggota perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyepakati tujuan pembangunan yang dikenal sebagai *Milenium Development Goals* (MDGs) yang dilaksanakan hingga tahun 2015 (Al-Fadhat & Savitri, 2023). Agar tujuan pembangunan *Milenium Development Goals* tetap berlanjut, pemimpin dunia dari 193 negara telah berkomitmen untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang diterapkan dari tahun 2016 hingga 2030 dengan prinsip universal, integratif dan memastikan tidak ada yang tertinggal. Artinya SDGs adalah pekerjaan dunia internasional dan berfungsi untuk mengatasi berbagai problematika masyarakat dalam aspek sosial dan ekonomi, khususnya bagi negara-negara berkembang (Sulthan et al., 2023).

Program SDGs ini juga bukan program yang dapat dijalankan dalam hitungan bulan, karena pengerjaan yang dilakukan dirancang untuk jangka panjang dan harapannya akan tercapai pada tahun 2030. SDGs terdapat 17 tujuan, 169 target dan 230 indikator kesemuanya untuk mengeliminasi kemiskinan, melestarikan bumi dan menjamin kesejahteraan bagi semua serta mengurangi kesenjangan dari berbagai sektor (Hakim, Lukmanul; Svinarky, 2022). Sebagai salah satu anggota PBB, Indonesia memiliki tanggung jawab secara langsung dalam pencapaian SDGs. Hal ini di perkuat dengan peraturan Presiden Republik Indonesia No. 59 Tahun 2017 yang berisi tentang komitmen negara Indonesia yang termasuk PBB untuk berperan aktif dalam penentuan sasaran di dalam pencapaian *Sustainable Development Goals*, dalam rencana pembangunan nasional jangka panjang dan jangka menengah.

Peran UMKM dalam pencapaian tujuan SDGs adalah sebagai awal dari perkembangan UMKM agar selalu meningkat hingga menjadi bisnis yang berskala besar. Adanya UMKM dapat memberikan dukungan terhadap pemerataan ekonomi sesuai dengan tujuan SDGs (Umat & Dua, 2023). Dimana salah satu bagian penting dari ekonomi Indonesia adalah bagian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM adalah pahlawan perekonomian negara karena tahan terhadap berbagai tantangan, dimana Indonesia pernah terjadi krisis ekonomi di tahun 1997 sampai 1998 yang membuat kondisi ekonomi menurun dan krisis keuangan global pada tahun 2008 hingga krisis kesehatan di tahun 2020. Saat itu mata uang terpuruk akibatnya harga kebutuhan rumah tangga dan industri ikut naik, sulitnya mendapatkan kredit, bank sentral mengetatkan likuiditas dan menaikkan suku bunga. Akibatnya banyak bisnis yang mengalami kerugian sehingga harus melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada karyawannya dan berakibat banyaknya pengangguran. Pada saat kondisi seperti itu, hanya sektor UMKM yang dapat bertahan hidup dalam menghadapi krisis ekonomi. Bahkan dengan UMKM Indonesia pernah menjadi anggota *Group Of Twenty* (G20) yaitu sebuah wadah kerja sama ekonomi internasional yang terdiri dari negara-negara yang memiliki ekonomi yang signifikan di dunia (Imannulloh & Rijal, 2022).

Usaha Mikro merupakan pilar pembangunan ekonomi bangsa, karena UMKM menyumbang penyerapan jumlah tenaga kerja yang banyak, berkontribusi dalam penciptaan Produk Domestik Bruto (PDB), bertujuan untuk meningkatkan nilai ekspor dan investasi dalam negeri. Menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KomenkopUKM) tahun 2024 dan Badan Pusat Statistik (BPS), total UMKM mencapai 26,422,256 usaha dan UMKM dapat menyerap 96,9% dari jumlah tenaga kerja dan 99,9% dari jumlah lapangan pekerjaan di Indonesia. Hal ini menjadikan Usaha Mikro mempunyai kedudukan yang sangat besar terhadap perekonomian di Indonesia. Potensi besar yang dimiliki UMKM adalah faktor pendukung terbesar terhadap peningkatan suatu ekonomi yang ada di daerah dan menjaga ketahanan ekonomi

Indonesia, karena dengan bertambahnya pertumbuhan UMKM dapat menyebabkan lebih banyak tenaga kerja yang terserap dan lebih sedikit pengangguran di Indonesia (Setiawan, 2023). Besarnya potensi yang dimiliki UMKM mampu menggerakkan ekonomi dan menjadi pusat pendapatan sebagian besar masyarakat.

Untuk dapat mencapai tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs), Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bisa menjadi garda terdepan untuk dapat mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan di tahun 2030 nanti. UMKM mempunyai kontribusi terhadap berbagai aspek ekonomi dan sosial. Beberapa kontribusi penting dari UMKM diantaranya penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan ekonomi, inovasi, adaptasi dan mengurangi dampak negatif ekonomi, sosial serta lingkungan pada operasi bisnis dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang menyeluruh dan terus berkelanjutan (Suhanto & Abidin, 2021).

Sektor UMKM merupakan ujung tombak perekonomian di Indonesia yang memiliki peranan penting dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera yang sesuai dengan target dalam mencapai SDGs di Indonesia pada tahun 2030 mendatang. Dimana yang dijelaskan dalam *Micro, Small, and Medium sized Enterprises (MSMEs) their role in achieving the Sustainable Development Goals*, bahwa UMKM dapat berkontribusi pada 17 tujuan dalam SDGs. Tetapi disini penulis hanya membahas dua poin dari peran UMKM terhadap pencapaian SDGs yaitu poin ke satu tentang pengentasan kemiskinan dan poin ke tiga tentang kesejahteraan masyarakat. Alasan memilih ke dua poin tersebut karena UMKM dapat mengukur tingkat kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Karena UMKM sering menjadi sumber utama lapangan pekerjaan, dengan UMKM maka kita dapat mengukur akses masyarakat terhadap kesempatan kerja serta pendapatan yang di peroleh. Selain itu, UMKM sering menjadi bagian dari ekonomi lokal, sehingga pertumbuhan UMKM dapat menggambarkan keadaan ekonomi masyarakat seperti tingkat kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat.

Kemiskinan masih menjadi permasalahan di dunia saat ini, meskipun sudah banyak kemajuan yang telah di capai dalam kemiskinan selama dekade terkahir, akan tetapi permasalahan ini masih menjadi fokus utama dalam upaya *Sustanaible Development Goals* atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Kemiskinan yaitu masalah multidimensional yang melibatkan akses terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, layanan kesehatan, perumahan layak, air bersih dan pendidikan. Hal ini juga berkaitan dengan kesenjangan sosial, ketidakadilan dan berkurangnya peluang yang adil bagi semua individu di masyarakat (Rosalinawati & Sukandar, 2023).

Kabupaten Kuningan yang terletak dikaki Gunung Ciremai yang dimana banyak memiliki sumber daya alam, sumber sejarah, dan sebagian orang mengenal sebagai kota yang memiliki keindahan wisata alam, potensi ekonomi Kuningan yang besar, tetapi kemiskinan masih serius. Menurut Achmad Nur Hidayat seorang pakar kebijakan publik nasional asal Kuningan yang dikutip dari situs www.rri.co.id/jawa-barat bahwa potensi ekonomi Kuningan yang sangat besar, tetapi ekonomi Kuningan masih terbelakang dan masalah kemiskinan menjadi permasalahan serius. Data tahun 2023 mencatat jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kuningan mencapai 133,88 ribu jiwa atau setara dengan 12,12 %, dan tingkat kemiskinan di kabupaten ini adalah yang kedua tertinggi di Jawa Barat. Berikut data jumlah persentase penduduk miskin Provinsi Jawa Barat.

Tabel 1. 1
Jumlah Persentase Penduduk Miskin 2021-2023

Wilayah Jawa Barat	Persentasi Penduduk Miskin		
	2021	2022	2023
Indramayu	13,04	12,76	12,13
Kuningan	13,10	12,76	12,12
Kota Tasikmalaya	13,13	12,72	11,53
Majalengka	12,33	11,94	11,21
Cirebon	12,30	12,01	11,20

Bandung Barat	11,30	10,82	10,52
Tasikmalaya	11,15	10,73	10,28
Cianjur	11,18	10,55	10,22
Garut	10,65	10,42	9,77
Subang	10,03	9,75	9,52
Kota Cirebon	10,03	9,82	9,16
Pangandaran	9,65	9,32	8,98
Purwakarta	8,83	8,70	8,46
Karawang	8,95	8,44	7,87
Provinsi Jawa Barat	8,40	8,06	7,62
Kota Sukabuni	8,25	8,02	7,50
Ciamis	7,97	7,72	7,42
Bogor	8,13	7,73	7,27
Sukabumi	7,70	7,34	7,01
Bandung	7,15	6,80	6,40
Bekasi	5,21	5,01	4,93
Kota Depok	2,52	2,53	2,38

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Selain itu tingkat pengangguran terbuka juga masih tinggi, yaitu sebesar 9,49 persen, yang termasuk ke dalam 6 kabupaten atau kota dengan pengangguran terbesar dari total 27 Kabupaten atau Kota di Jawa Barat. Berikut data jumlah persentase tingkat pengangguran terbuka Provinsi Jawa Barat.

Tabel 1. 2
Jumlah Persentase Tingkat Pengangguran 2021-2023

Wilayah Jawa Barat	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota (Persen)		
	2021	2022	2023
Kota Cimahi	13,07	10,77	10,52
Kuningan	11,68	9,81	9,49
Kota Bogor	11,79	10,78	9,39

Karawang	11,83	9,87	8,95
Bekasi	10,09	10,31	8,87
Kota Bandung	11,46	9,55	8,83
Kota Sukabumi	10,78	8,83	8,53
Bogor	12,22	10,64	8,47
Kota Bekasi	10,88	8,81	7,90
Purwakarta	10,70	8,75	7,72
Cianjur	9,32	8,41	7,71
Kota Cirebon	10,53	8,42	7,66
Cirebon	10,38	8,11	7,65
Subang	9,77	7,77	7,65
Provinsi Jawa Barat	9,82	8,31	7,44
Sukabuni	9,51	7,77	7,32
Kota Depok	9,76	7,82	6,97
Sumedang	9,18	7,72	6,94
Kota Tasikmalaya	7,66	6,62	6,55
Bandung	8,32	6,98	6,52
Indramayu	8,30	6,49	6,46
Kota Banjar	6,09	5,53	5,43
Majalengka	5,71	4,16	4,12
Tasikmalaya	6,16	4,17	3,89
Ciamis	5,06	3,75	3,52
Pangandaran	3,25	1,56	1,52

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Dapat kita lihat pada tabel 1.2 bahwa angka pengangguran di Kabupaten Kuningan masih cukup tinggi bahkan menempati posisi ke dua dengan tingkat pengangguran tertinggi di Provinsi Jawa Barat. Akibat dari rendahnya upah minimum dan belanja daerah yang tidak efektif. Karena itu, Kuningan berkomitmen untuk mencapai kemajuan ekonomi dan berpotensi untuk mengembangkan ekonomi kreatif dalam upaya menciptakan lapangan pekerjaan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana yang telah kita ketahui masalah yang sangat multidimensional yang cenderung sulit untuk bisa diatasi jika tidak diimbangi dengan kinerja serta kerjasama dari pemerintah dan stakeholder secara efektif serta inovatif. Sehingga dengan melihat kenyataan tersebut pemerintah Kabupaten Kuningan sebagai pelaksana dalam mengatasi kemiskinan di daerah harus cerdas di dalam mengenali masalah-masalah yang ada di daerahnya dan menggali potensi-potensi yang ada untuk bisa memberdayakan masyarakat supaya dapat bebas dari lingkaran kemiskinan

Berdasarkan tabel 1.1 menurut Badan Pusat Statistik, 2024 menunjukkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Kuningan pada tahun 2023 total masyarakat miskin menurun sebesar 0,64% dari tahun 2022. Dapat kita lihat total masyarakat miskin tahun 2021-2023 mengalami fluktuatif. Di tahun 2021 jumlah persentase kemiskinan yaitu sebesar 143,35 ribu jiwa atau 13,10%. Sementara di tahun 2023 mengalami penurunan yaitu sebesar 133,88 ribu jiwa atau setara dengan 12,12%. Dengan menurunnya persentase masyarakat miskin dapat menggambarkan bahwa pendapatan masyarakat secara keseluruhan mengalami peningkatan, adapun dengan meningkatnya persentase masyarakat miskin mencerminkan bahwa pendapatan masyarakat mengalami penurunan.

Untuk mengatasi kemiskinan ini Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan tujuan pembangunan berkelanjutan sebagai kerangka kerja yang luas. Cara yang dilakukan pemerintah di dalam mengatasi angka kemiskinan yaitu dengan cara mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah karena memiliki keunggulan seperti tersebar perkotaan atau daerah pelosok, memiliki potensi pertumbuhan yang besar, kesempatan kerja yang besar serta peningkatan pendapatan serta dapat mawadahi banyak tenaga kerja yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah.

Keberadaan UMKM di Kabupaten Kuningan mampu menjadi jalan untuk masyarakat di dalam mencari pekerjaan. Meningkatnya angka kemiskinan di Kabupaten Kuningan dan banyaknya jumlah UMKM yang tersebar di beberapa daerah telah memberikan peluang pekerjaan bagi masyarakat untuk memperoleh penghasilan. Dengan seiringnya kebijakan

pemerintah dalam ikut serta dalam pemberdayaan UMKM dan memberikan dukungan kepada para pelaku UMKM di Kabupaten Kuningan. Akhirnya peran UMKM sangat berarti di dalam memajukan perkembangan ekonomi di Kabupaten Kuningan. Berikut gambaran jumlah UMKM di Kabupaten Kuningan.

Tabel 1. 3
Jumlah UMKM di Kabupaten Kuningan Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah UMKM
1	Cilimus	6,745
2	Cigugur	6,255
3	Darma	6,393
4	Ciawigebang	8,637
5	Cibingbin	3,532
6	Cidahu	4,018
7	Ciniru	1,853
8	Garawangi	5,165
9	Jalaksana	6,719
10	Lebakwangi	6,100
11	Luragung	2,620
12	Cirendang	1,965
13	Hantara	1,479
14	Subang	2,924
15	Cigandamekar	3,598
	Total	67,003

Sumber: Diskopdagperin kabupaten Kuningan (2024)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwasannya jumlah produk UMKM yang berada di Kabupaten Kuningan berjumlah 67,003 produk dengan rincian, kecamatan yang memiliki total produk terbesar adalah Kecamatan Ciawigebang dimana pada kecamatan tersebut memiliki jumlah produk 8,637 produk, dan yang menempati posisi kedua adalah kecamatan Cilimus dengan total produk 6,745 produk. Dari banyaknya

UMKM yang tersebar di berbagai kecamatan pasti memiliki keunggulan masing-masing dari setiap produk yang dimilikinya.

Selain peran UMKM terhadap pencapaian SDGs yaitu mengurangi tingkat kemiskinan, UMKM juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan hadirnya UMKM dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Permasalahan kesejahteraan masyarakat dapat terjadi karena ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang menjadi masalah serius dalam masyarakat termasuk ketidaksetaraan pendapatan. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), kesejahteraan adalah keadaan seseorang dapat memenuhi tingkat hidupnya yaitu seperti kebutuhan pokok dalam rumah tangganya. Terdapat delapan indikator menurut BPS dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat, seperti pendapatan, akses pangan, kondisi tempat tinggal, fasilitas perumahan, kesehatan, serta layanan pendidikan, (Aliyah, 2022).

Dari delapan indikator yang telah disebutkan sebelumnya, UMKM memiliki peran atau fungsi yang sangat besar untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang pertama dari pemasukan, hadirnya UMKM pasti dapat menyerap para tenaga kerja yang lebih banyak yang akhirnya masyarakat mendapatkan pemasukan dari UMKM tersebut. Selain itu, pemasukan yang diperoleh dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka seperti peningkatan kemampuan masyarakat untuk membeli kebutuhan (Ilmi, 2021). Sehingga, ketika semakin meningkatnya daya beli masyarakat maka dapat mendukung dalam menciptakan fasilitas-fasilitas untuk memenuhi kehidupan masyarakat. Karena sebab itu, indikator-indikator dalam UMKM dapat menjadi penghubung satu sama lain, akhirnya kesejahteraan masyarakat dapat terwujud (Wika Undari, Anggia Sari Lubis, 2021).

Dengan adanya UMKM diharapkan dapat berkontribusi besar terhadap kesejahteraan masyarakat di dalam mengatasi kesulitan yang sering terjadi diantaranya angka kemiskinan serta tingginya tingkat pengangguran. Dengan adanya UMKM diharapkan bisa mengurangi angka pengangguran dari tahun ke tahun yang semakin bertambah, mengatasi

angka kemiskinan dengan memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat yang kurang mampu dan upaya untuk meratakan pendapatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta memastikan bahwa mereka memiliki kesempatan yang adil dan setara.

Fokus tempat penelitian terkait dengan UMKM adalah Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan. Kecamatan Ciawigebang terletak di sebelah Timur dari Kota Kuningan dimana menurut Badan Pusat Statistik (BPS) luas wilayah Kecamatan Ciawigebang 61,36 km², dengan jumlah penduduk sebanyak 97,211,00 jiwa. Salah satu alasan Kecamatan Ciawigebang diamati sebagai objek penelitian adalah tingginya jumlah UMKM yang tersebar disana sehingga terdapat peluang besar dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Serta penelitian ini akan lebih mengedepankan pemilihan UMKM dalam sektor pangan. Alasannya karena UMKM sektor pangan di Kecamatan Ciawigebang memiliki usaha dibidang makanan atau kuliner yang merupakan usaha yang banyak digeluti oleh masyarakat Ciawigebang, baik itu gembong yang menjadi oleh-oleh khas Kuningan, tape, kripik singkong, kue, rengginang, tempe, tahu, dan lain sebagainya.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini merupakan salah satu masalah multidimensional yang sudah menjadi problematika di dalam kehidupan masyarakat yaitu mengenai persoalan-persoalan terkait dengan masalah kemiskinan dan terkait dengan peningkatan kesejahteraan yang menjadi salah satu tujuan dari pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Oleh karena itu penulis ingin mengetahui dan menganalisis peran dari adanya UMKM terhadap pencapaian tujuan dari SDGs tersebut. Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Pencapaian Tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) (Studi Kasus di Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan).”**

B. Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya, adapun masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah: kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat

- a. Masalah kemiskinan berkaitan dengan kesenjangan sosial, ketidakadilan dan berkurangnya peluang yang adil bagi semua individu di masyarakat.
- b. Masalah kesejahteraan terjadi karena ketidaksetaraan pendapatan masyarakat.

2. Batasan Masalah

Dalam pembahasan penelitian ini, peneliti memberikan batasan sebagai berikut:

- a. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini terbatas pada informasi yang berkaitan dengan UMKM yang berada di Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan.
- b. Variabel yang akan dianalisis meliputi peran UMKM (X) di tinjau dari masalah kemiskinan (Y1) dan kesejahteraan masyarakat (Y2).

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah sebelumnya, maka permasalahan dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Apakah peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berpengaruh signifikan terhadap pengentasan kemiskinan di Kecamatan Ciawigebang?
- b. Apakah peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berpengaruh signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Ciawigebang?

C. Tujuan Penelitian

Ada beberapa tujuan dalam penelitian ini yang sesuai dengan permasalahan yang akan diajukan, yaitu:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berpengaruh signifikan terhadap pengentasan kemiskinan di Kecamatan Ciawigebang.

- b. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Ciawigebang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini berfokus pada Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Pencapaian Tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) (Studi Kasus Di Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan), peneliti ini berharap agar penelitian yang dilakukan ini bermanfaat dan dapat digunakan untuk beberapa hal sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru pada pengetahuan dan pemahaman ilmu mengenai pengaruh Usaha Mikro Kecil dan Menengah terhadap pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Ciawigebang.

2. Bagi Praktisi

Adanya penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan penulis dalam mengembangkan peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan.

3. Bagi Akademisi

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi landasan bagi penelitian mendatang yang serupa, serta menjadi titik pembandingan yang bermanfaat untuk penelitian selanjutnya.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika ini dirancang agar memudahkan pemahaman serta memberikan gambaran keseluruhan kepada pembaca mengenai penelitian yang akan dilakukan, adapun sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bagian ini, akan disajikan secara singkat latar belakang masalah yang mencakup rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN TEORI

Pada bab ini menggambarkan secara rinci terkait temuan dari lima belas jurnal yang relevan dengan penelitian ini untuk memberikan pemahaman yang komperhensif tentang topik tersebut. Dalam bukti empiris tersebut menggambarkan hubungan antara peran UMKM, pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat.

BAB III: METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini dijelaskan dalam metode penelitian, penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif. Dengan sumber data primer yang diperoleh dengan menggunakan cara kuisioner yang diberikan kepada para pelaku UMKM.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHAAN

Bab ini menguraikan hasil dan pembahasan dari hasil penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan masalah. Deskripsi dari bab ini terdiri dari objek penelitian, deskripsi data yaitu membahas tentang pengaruh peran UMKM terhadap pengentasan kemiskinan, peran UMKM terhadap kesejahteraan masyarakat dalam ketercapaian tujuan *Sustanaible Development Goals*.

BAB V: PENUTUP

Bab ini menyajikan hasil kesimpulan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Kesimpulan berisi tentang hasil penelitian yang dilakukan pada bab empat tentang hasil pembahasan sebagai jawaban dari permasalahan yang diteliti. Penulis juga akan memberikan saran kepada pihak-pihak yang terkait dan peneliti berikutnya yang tertarik dengan permasalahan yang sama.